



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kemana Uang Pajak Ratusan Juta?

kan. Berikut laporannya.

BERDASARKAN data sementara yang berhasil dihimpun RB selama bulan Juni ini, OPD paling banyak menunggak pajak randisnya adalah Sekretariat Daerah (Setda) dengan 76 unit. Disusul Dinas Kesehatan (Dinkes) 51 unit, dan Dinas Pertanian sebanyak 48 unit. *(selengkapnya lihat grafis).*

Bahkan menariknya, pada website SIRUP LKPP tahun anggaran 2022 ini, Setda Kabupaten Kepahiang dan Dinas Pertanian tidak mencantumkan anggaran pembayaran pajak kendaraan dinas. Berbeda dengan Dinkes yang mencantumkan anggaran biaya pemeliharaan pajak kendaraan sebesar Rp 71,4 juta.

Dijelaskan Kasubbag Tata Usaha Samsat Kabupaten Kepahiang, Ikkal Pahsy, S.Sos bahwa untuk sementara ini pihaknya masih melakukan pemutakhiran data dikarenakan data randis yang selama ini dilakukan pihaknya dibagi kategori per kecamatan saja.

"Data yang ada saat ini sifatnya baru sementara, karena tim kita pun sampai saat ini masih melakukan penghimpunan di seluruh lini OPD," beber Ikkal.

"Kita akan lakukan pendataan lagi terkait kendaraan dinas yang dipegang OPD, dan kendaraan dinas yang sudah tidak bisa beroperasi lagi. Karena kendaraan yang tidak beroperasi lagi itu kan pajaknya harus terus dibayarkan itu. OPD tidak mungkin bayar pajak lagi terhadap kendaraan yang sudah tidak beroperasi lagi," jelas

Ia mengakui bahwa sebelum melakukan perbaikan karena mayoritas OPD yang kendaraan dinas kerap kesulitan dalam menyampaikan data, termasuk data aset randis yang telah keluar dari database OPD.

"Ke depan pembaharuan data perlu kita lakukan bekerja sama dengan setiap OPD. Kita pun berharap kepada OPD yang ada, agar secara berkala bisa menyampaikan update data randis

Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd mengatakan bahwa pajak kendaraan dinas merupakan tanggung jawab masing-masing OPD yang memilikinya, bukan dibebankan di anggaran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepahiang. Hal ini lantaran di setiap OPD sudah dianggarkan melalui APBD untuk pembayaran randis yang menunjang operasional OPD.

"Untuk pajak kendaraan dinas OPD, itu tanggungjawab dari OPD itu masing-masing. Bukan di bawah tanggungjawab Setdakab Kepahiang. Inilah yang selama ini menjadi miskomunikasi antara OPD dengan Setdakab," ungkap Hartono.

Untuk itu, guna mengantisipasi kesalahpahaman seperti ini terus berlanjut, Setdakab akan melakukan pendataan terhadap seluruh kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat, di OPD yang ada di lingkungan Pemkab Kepahiang.

Disisi lain, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepahiang Andrian Defandra, SE, M.Si mengatakan, bahwa salah satu catatan BPK RI atas audit yang dilakukan beberapa waktu lalu adalah terkait pajak kendaraan dinas. Untuk itu pihaknya menyarankan kepada Bupati Kepahiang untuk segera melakukan evaluasi, karena setiap tahunnya untuk pembayaran pajak kendaraan dinas selalu dialokasikan melalui APBD Kabupaten Kepahiang.

"Kita pertanyakan nanti di pembahasan LHP BPK di komisi-komisi dewan. Kenapa sampai pajak kendaraan ini banyak yang menunggak, uangnya dikemanakan? Ini bisa menjadi bah-

an evaluasi Bupati kepada jajaran OPD-nya. Kita juga akan lihat dari pembahasan LHP nanti, apa penjelasan dari setiap OPD atas pajak kendaraan dinas yang menunggak? Kalau memang ada kelalaian, maka yang bersangkutan tidak layak menjadi kepala OPD, dan Bupati harus segera mengevaluasi itu," singkat

Sementara itu, Kapolres Kepahiang AKBP. Suparman, S.IK, MAP melalui Kasat Lantas Iptu. Dendi Putra, SH mengingatkan kepada seluruh OPD yang memiliki randis menunggak pajak, agar segera menjalankan kewajibannya dengan membayar pajak kendaraan sebelum tanggal 13 Juli 2022 mendatang.

Jika dalam waktu yang ditentukan tersebut, OPD tersebut tak kunjung melaksanakan kewajibannya, maka Satlantas Polres Kepahiang tidak segan-segan melakukan penilangan terhadap randis tersebut, jika ditemukan masih melakukan operasional dinas.

"Ya, kita juga sudah dapatkan informasi dari Samsat

Kabupaten Kepahiang, bahwa setiap tahunnya angka randis yang bandel pajak terus mengalami peningkatan. Dan kita sampaikan hal itu kepada pimpinan, dan saat ini instruksi

pimpinan kita lakukan imbauan terlebih dahulu, sebelum akhirnya kita akan ambil tindakan atas pelanggaran tersebut," tegas Dendi.

Dendi mengatakan, tindakan yang akan dilakukan pihaknya tersebut bukan tanpa tujuan. Selain dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas, tindakan ini juga dalam rangka peran serta Polri membantu pemerintah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

"Kita ketahui ada 550 unit kendaraan dinas yang menunggak pajak, dan nominalnya mencapai Rp 700-an juta. Ini jumlah yang tidak sedikit uang rakyat yang terpendam. Padahal setiap tahunnya selalu dianggarkan untuk pembayaran pajak kendaraan ini," beber Dendi. **(sly)**